

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Menurut Mardiasmo (2002) intervensi yang dilakukan pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Dengan adanya reformasi ini, pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Mardiasmo (2002) menyatakan :

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerahnya melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Indra bastian (2006 : 341) menyatakan otonomi yang diberikan kepada daerah meliputi empat aspek utama, yaitu otonomi politik, otonomi hukum, otonomi

ekonomi dan otonomi budaya. Salah satu tujuan program otonomi daerah dalam bidang ekonomi menurut Indra Bastian (2006 : 354) adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditempuh dengan cara peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Untuk pengelolaan daerah yang dibutuhkan tidak hanya sumber daya manusia, akan tetapi juga sumber daya keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Anggaran daerah atau APBD adalah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, sebagai instrumen kebijakan tersebut anggaran daerah menduduki posisi yang utama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Selain itu anggaran daerah juga digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja juga sebagai alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002:143). Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi utama tersebut harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja yang terkait dalam dengan anggaran merupakan kinerja keuangan, yang berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Indra Bastian (2006 : 342) menyatakan bahwa :

Salah satu indikator dalam bidang ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (mengelola keuangan daerahnya sendiri)

adalah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil, dengan meningkatnya PDRB riil peningkatan pendapatan per kapita akan terdorong.

Menurut Ardy Hamzah (2008) pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah sering kali diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai di daerah tersebut. Arsyad dalam (Ardy Hamzah : 2008) menyatakan bahwa:

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Apabila kita ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah indikator umum yang dapat digunakan adalah melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Berapa persen perkembangan atas nilai PDRB yang terjadi pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut.

Berdasarkan laporan BPS Kota Bandung, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2001-2008 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2001 PDRB Kota Bandung mencapai Rp17.435.720 , pada tahun 2002 mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp20.690.499 hingga pada tahun 2008 angka PDRB Kota Bandung mencapai Rp 60.441.487,00. Dari data tersebut terlihat bahwa pendapatan masyarakat Kota Bandung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Untuk mengetahui berapa pertumbuhan

ekonominya berikut peneliti sajikan data tabel PDRB dan hasil perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung tahun 2001-2008 :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung

Tahun	Tabel Pertumbuhan Ekonomi	
	PDRB	Rasio Pertumbuhan Ekonomi
2001	Rp17.435.720	0,163
2002	Rp20.690.499	0,157
2003	Rp23.420.126	0,134
2004	Rp27.422.417	0,146
2005	Rp34.792.184	0,196
2006	Rp43.491.380	0,200
2007	Rp50.552.182	0,140
2008	Rp60.441.487	0,164
2009	Rp70.281.163	0,140

(BPS Kota Bandung 2001-2008, diolah 2010)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan walaupun PDRB nya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, tetapi hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Bandung dari tahun 2002-2009 menunjukkan pertumbuhannya tidak terus menerus mengalami peningkatan. Tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 0,53%, tahun 2003 mengalami penurunan kembali sebesar 2,32%, Tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 1,18%, tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai 5,00%, akan tetapi untuk tahun 2007 malah mengalami penurunan yang lebih besar yaitu sebesar 6,04%. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan kembali sebesar 2,40%, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar 2,40%.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Setelah terjadinya reformasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi PAD untuk keberlangsungan rumah tangga daerahnya sendiri sehingga dalam membiayai pembangunannya daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan data dari laporan APBD Kota Bandung realisasi PAD Kota Bandung dari tahun 2001-2008 mengalami terus peningkatan. Untuk lebih jelasnya berikut tabel Realisasi PAD Kota Bandung :

Tabel 1.2
Realisasi PAD

tahun	Realisasi PAD
2001	Rp123.984.485,749
2002	Rp182.064.238,544
2003	Rp213.029.461,862
2004	Rp222.909.941,952
2005	Rp225.596.438,613
2006	Rp253.882.919,542
2007	Rp287.249.534,045
2008	Rp314.627.155,412

(Laporan APBD Kota Bandung 2001-2008, diolah 2010)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut terlihat dari tahun 2001-2008, realisasi PAD terus mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung semakin baik dalam mengelola potensi PAD nya. Hal tersebut

berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang bergerak fluktuasi.

Penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan pada penelitian ini berdasarkan pada rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat peneliti katakan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam Akuntansi Sektor Publik antara lain merujuk pada pendapat Indra Bastian (2006:15) yang menyatakan bahwa :

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dengan melihat fenomena yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan berupa rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan berupa rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.
4. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana pengaruh antara kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan berupa rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan berupa rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perkembangan ilmu akuntansi, khususnya ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung, pengungkapan kinerja keuangan pada APBD dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah setelah otonomi daerah, sehingga kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.